

Siap Kalah, Why Not?

Dalam waktu dekat, Riau akan mengadakan perhelatan pemilihan kepala daerah (pemilu kada) untuk memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan menakhodai Riau untuk 5 tahun. Tahapan demi tahapan pun telah dimulai dan sudah tercatat beberapa pasang calon yang disahkan oleh KPU Riau yang akan bersaing mendapatkan simpati publik. Pemilu kada tahun ini tentunya diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berjalan dengan damai, dan mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Riau.

Politik dan konflik

Konflik dan politik memiliki relasi yang tak dapat dipisahkan. Di mana ada aktifitas politik, di situ akan ada konflik. Secara sederhana, politik menunjuk kepada upaya merebut kekuasaan dan konflik merupakan eksese dari upaya tersebut.

Seiring dengan adanya liberalisasi politik di negeri ini, konflik politik telah mengisi ruang dinamika politik tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Salah satunya adalah dalam perhelatan pemilu kada.

Konflik politik dalam pemilu kada sebenarnya lebih potensial destruktif dibandingkan pemilihan presiden karena gesekan politik dan kepentingan antar kelompok secara nyata bersentuhan langsung. Setiap kelompok dapat saja dengan mudah bergerak atau digerakkan apabila ada perbedaan pandangan, sikap, atau ketidakpuasan dalam proses pelaksanaan pemilu kada. Sebagai contoh, berbagai kekerasan politik sering terjadi di berbagai daerah berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kada.

Pada dasarnya pemilu kada merupakan panggung konflik karena ia merupakan arena perebutan kekuasaan untuk mendapatkan kursi kepemimpinan daerah. Namun, apakah pemilu kada salah?

Pemilu kada merupakan konsensus sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin daerah. Adanya pemilu kada merupakan upaya penguatan demokrasi lokal. Pada dasarnya konflik secara keseluruhan tidak akan bisa dibinasakan, tapi dapat dikendalikan dan diminimalisir dengan manajemen konflik sehingga terciptanya pemilu kada damai. Bagaimanapun pemilu kada hanya permulaan awal proses kepemimpinan di daerah untuk beberapa tahun mendatang, sementara roda pemerintahan, ekonomi, dan sektor-sektor kehidupan rakyat di daerah harus tetap dapat berjalan.

Sarana pendidikan politik

Pemilu kada damai sering kali digaungkan sebelum dimulainya tahapan kampanye terbuka dan komitmen untuk itu seharusnya menjadi *trend* mengisi sistem politik baik di pusat maupun di daerah. Secara filosofis, komitmen tersebut merupakan *memorandum of understanding* antar para calon kepala daerah (cakada) untuk mewujudkan pemilu kada damai jauh dari anarkisme politik.

Tapi kenyataannya, dengan melihat berbagai pemilu kada di daerah lain di negeri ini, ketidakpuasan yang berujung pada kekerasan politik malahan masih saja terjadi walaupun telah dilaksanakan deklarasi damai. Komitmen awal untuk mewujudkan pemilu kada damai habis terkikis karena egoisme politik.

Perlu dicermati berbagai hal menyangkut peluang terjadinya kekisruhan dan kekerasan politik dengan tidak semata-mata hanya menyalahkan satu pihak tertentu. Tapi permasalahan ini harus dilihat secara menyeluruh yang melibatkan cakada sebagai peserta, KPU sebagai penyelenggara, dan rakyat sebagai *voter* yang akan menentukan siapa yang layak memimpin suatu daerah.

KPU sebagai penyelenggara pemilu kada mesti menunjukkan kerja-kerja profesional dan memposisikan diri sebagai institusi yang netral. Bila KPU dipandang berpihak kepada salah satu pihak, atau melakukan kebijakan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, ini berarti KPU mengundang datangnya permasalahan. Cukupilah KPU bekerja sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan undang-undang, dan jangan sampai mencari celah memanfa'atkan kewenangan tersebut untuk menguntungkan pihak tertentu.

Setiap cakada mesti memahami esensi perhelatan demokrasi lokal ini. Pemilu kada tidak hanya dipahami sebatas ajang memenangkan kepentingan politik, tapi juga mesti dipandang sebagai media pendewasaan politik dan peningkatan kualitas demokrasi lokal. Cakada mesti memahami *rule of game* yang ada, menghindari segala bentuk kecurangan yang dapat mengeruhkan suasana dan menihilkan kualitas pemilu kada.

Kedewasan rakyat di daerah dalam menentukan sikap juga penting. Harus jeli melihat dan berfikir secara rasional terhadap setiap isu dan peristiwa yang menyertai pemilu kada. Jangan sampai masuk dalam jebakan cakada untuk melakukan anarkisme politik demi menyelamatkan kepentingan cakada yang bersangkutan. Inilah yang nampaknya sering terjadi di daerah-daerah lain. Aksi perusakan kantor KPU, sekretariat pemenang cakada tertentu, teror terhadap cakada menjadi contoh kongkret.

Bila ketiga hal tersebut dapat hadir, tentu kita tak perlu khawatir dalam setiap pemilu kada. Bahkan pihak kepolisian pun tak perlu repot-repot melakukan pengamanan. Lalu bagaimana dengan pemilu kada untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau dalam waktu dekat ini?

Secara khusus, setiap pasangan cakada diharapkan memiliki komitmen untuk menyukkseskan perhelatan demokrasi tersebut, termasuk "siap kalah". Siap kalah bukanlah hal yang mudah diterima dalam praktiknya. Setiap cakada pada dasarnya akan mengerahkan dan mengoptimalkan segala potensi, struktur, dan senjata politik untuk mengantarkannya pada kursi kekuasaan. Satu hal yang pasti, pemenang hanya

satu diantara sekian cakada yang ada dan kenyataan ini harus dapat diterima oleh semua cakada.

Spekulasi kalah tentulah menjadi beban psikologis setiap cakada. Namun, ini bukanlah justifikasi untuk menghalalkan atau melegalkan segala cara apalagi melibatkan massa *grassroot* pada kekerasan politik. Sebaliknya, sikap “siap kalah” dari setiap pasangan cakada akan memberikan pendidikan politik kepada rakyat bersamaan dengan pemilu kada damai dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Bilapun ada ketidakpuasan yang muncul pada proses pelaksanaan dan hasil pemilu kada kelak, penyelesaian melalui jalur hukum yang sudah diatur undang-undang tentu menjadi cara terbaik.

Melihat beberapa pelaksanaan pemilu kada yang pernah dilakukan di Riau, selain alasan kultur melayu yang agamis, nampaknya masyarakat tidak mudah terjebak pada hasutan pihak-pihak tertentu yang berindikasi politis. Kalaupun terjadi konflik politik, hanya sebatas pada level elit politik saja. Namun, tetap perlu diantisipasi segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Tentu yang tak kalah penting dalam perhelatan pemilu kada tahun ini adalah komitmen “siap kalah” dari para cakada. *Why not? **